



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.


Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan

strategi seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja Perubahan yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perubahan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Magelang, 25 Agustus 2023


KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG
SUSLOWATI, SE, MT, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19721101 199803 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	25
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 29	
2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	31
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	31
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	32
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023.....	33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	54
3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	104
BAB V PENUTUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022.....	9
Tabel 2.2 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	13
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	15
Tabel 2.4 Sasaran Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.. ..	25
Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	27
Tabel 2.4.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Magelang	35
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Perubahan Tahun 2023 Kota Magelang	51
Tabel 3.1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang	53
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	55
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Magelang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	60
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	120
Lampiran 2	Keputusan Walikota Magelang Nomor 650.24/178/112 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	123
Lampiran 3	Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.24/149/112 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	127

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pembaruan dari Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya. Tujuan dari Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah untuk mengakomodasi perubahan atau penyesuaian rencana kerja suatu perangkat daerah berdasarkan berbagai faktor seperti perubahan kondisi, anggaran, kebijakan, atau prioritas. Dokumen ini mencakup informasi seperti program kerja, kegiatan, indikator kinerja, target, sumber daya yang dibutuhkan, serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja beserta perubahannya. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan evaluasi hasil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; pembahasan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk tahun kedua periode Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja Perubahan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan

nasional. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2023, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Renja K/L, dan Renja Perubahan Tahun 2023 BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
 11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
 13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Rencana Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tepatnya pada pasal 343 bahwa Perubahan RKPD/Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan seperti faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian, kebijakan fiskal, serta kondisi politik dan sosial suatu daerah sehingga berdampak pada berbagai sektor yang kemudian memaksa untuk dilakukannya refocusing, realokasi, bahkan rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penganggarnya untuk memenuhi rancangan anggaran yang efektif dan responsif terhadap keadaan yang terus berubah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah :

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 3.4 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu serta tahun berjalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan tahun berjalan ini sampai dengan triwulan II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan yakni pada momen perubahan anggaran tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana

program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta subag/subid pelaksana.

Adapun capaian indikator kinerja pada Renja tahun 2022 sebagai bahan evaluasi bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	114,14 %	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran	102,74 %
					2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan	170,80 %
					2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi	100%
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Presentase Penganggaran sesuai ketentuan	102,74 %

				Anggaran Daerah		
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	170,80 %
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100.00 %
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100.00 %
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	116.67 %
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	140,65 %
2.	Tujuan : Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	149,42 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	149,43 %
	Sasaran : Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	147,29 %	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	169,62 %

Sumber : LKjIP 2022 BPKAD Kota Magelang

Dari hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2022, tidak ada kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program maupun kegiatan BPKAD Kota Magelang pada tahun 2022 telah tersusun dengan baik. Jika dilihat dari capaian indikatornya yang rata-rata 100% bahkan lebih bisa pula dikatakan jika program dan kegiatan yang ada di BPKAD Kota Magelang pada

Tahun 2022 telah berhasil menunjang terhadap pencapaian indikator-indikator kerjanya.

Sesuai dengan hasil evaluasi di atas serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dalam artian bahwa seluruh Program dan Kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditentukan. Bahkan terdapat 3 Program dan 4 Kegiatan yang capaian indikator kerjanya melebihi dari target, yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian indikator kerjanya masing-masing sebagai berikut :
 - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran sebesar 102,74%
 - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan sebesar 170,80%
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 111,40%
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 169,61%
4. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,74%
5. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 170,80%
6. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 140,65%
7. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 169,62%.

Hal tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, di antaranya adalah :

1. Tersedianya sistem penganggaran yang terpadu dari Kementerian yang mempermudah dalam teknis penyusunan dokumen penganggaran.
2. Media sosial yang selalu update dalam memberikan akses informasi, sosialisasi, bimtek atas ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
3. Pemanfaatan teknologi sistem informasi yang terintegrasi serta yang memberikan informasi secara transparan, terupdate dan akuntabel, yang mempermudah dalam pengumpulan, penarikan data, serta pelaksanaan transaksi keuangan yang diperlukan guna penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan.
4. Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.
5. Timeline perencanaan yang lebih efektif dan efisien.
6. Adanya pengembangan-pengembangan pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yang memudahkan Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menyetorkan pajak/retribusi daerah yang menjadi kewajibannya.
7. Kebijakan penerapan transaksi non tunai.
8. Stimulan kepada masyarakat untuk pro aktif membayar pajak daerah melalui penyelenggaraan atau even Gebyar Pajak Daerah.

Namun terdapat pula beberapa program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diatas yang capaiannya sesuai target, yaitu terdapat pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan.

2. Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
3. Sosialisasi atau pembinaan pengelola keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara intensif.

Tabel 2. 2
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	Masih kurangnya pemahaman SDM Pengelola Keuangan terhadap pencatatan dan penyajian data pada dokumen-dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang secara menyeluruh.	Dukungan OPD yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.	Pemanfaatan teknologi sistem informasi yang terintegrasi serta yang memberikan informasi secara transparan, terupdate dan akuntabel, yang mempermudah dalam pengumpulan, penarikan data.	Lebih mengintensifkan lagi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel
2.	Belum semua OPD menggunakan ASB dan HSPK dalam penyusunan anggaran.	Tersedianya sistem penganggaran yang terpadu dari Kementerian yang mempermudah dalam teknis penyusunan dokumen penganggaran.	Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.	Lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pejabat pengelola keuangan perangkat daerah.

3.	Pengurus barang yang sering berganti personilnya.	Diadakan pembinaan/ bimbingan teknis terkait SimAset secara kontinyu.	Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah dari OPD belum tepat waktu sehingga mengakibatkan pengelolaan BMD yang kurang optimal.	Lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pejabat pengelola barang di OPD.
4.	Beberapa pemungutan pajak daerah terkendala perijinan sehingga berakibat kehilangan potensi PAD. Dalam pelayanan pajak daerah secara online terdapat sistem informasi manajemen yang belum terintegrasi sehingga dalam rangka penyajian data penerimaan pendapatan mengalami kesulitan	Semakin tergalinya potensi-potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga bisa menambah penerimaannya.	Kebijakan pemerintah dalam penetapan cuti bersama yang berpengaruh terhadap kenaikan jumlah wisatawan pada kunjungan ke hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan PAD melalui peningkatan kontribusi BUMD yang berupa pengelolaan BUMD secara profesional lagi. - Diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang ada.

Sumber: LKjIP Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 *)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8	9	11	12		
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67	%	N/A	N/A	100	(%)	100	(%)	100.00 %	96.67%	98.33%	101.72 %		
01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	N/A	N/A	100	(%)	100	(%)	100.00 %	100%	100%	100.00 %		
01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat	3	dokumen	N/A	N/A	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00 %	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %
01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	N/A	N/A	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00 %	1 dokumen	1 dokumen	100.00 %

01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	N/A	N/A	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00 %	1 dokumen	1 dokumen	100.00 %
01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	N/A	N/A	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00 %	1 dokumen	1 dokumen	100.00 %
01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	N/A	N/A	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00 %	1 dokumen	1 dokumen	100.00 %
01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	N/A	N/A	3	Laporan	3	Laporan	100.00 %	3 laporan	3 laporan	100.00 %
01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100	%	N/A	N/A	100	(%)	100	(%)	100.00 %	1 00%	1 00%	100.00 %
01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/bulan	N/A	N/A	55	Orang/Bulan	55	Orang/Bulan	100.00 %	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100.00 %
01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	dokumen	N/A	N/A	24	Dokumen	24	Dokumen	100.00 %	24 dokumen	24 dokumen	100.00 %
01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	N/A	N/A	18	Laporan	18	Laporan	100.00 %	18 Laporan	18 Laporan	100.00 %
01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100	100	N/A	N/A	100	(%)	100	(%)	100.00 %	100%	100%	100.00 %

01	2015	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	2	Kegiatan	N/A	N/A	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100.00 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %
01	2016		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	N/A	N/A	100	(%)	100	(%)	100.00 %	100%	100%	100.00 %
01	2016	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35	Paket	N/A	N/A	35	Paket	35	Paket	100.00 %	35 Paket	35 Paket	100.00 %
01	2016	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	N/A	N/A	0	Paket	0	Paket	#DIV/0!	1 paket	2 paket	200.00 %
01	2016	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	Paket	N/A	N/A	80	Paket	80	Paket	100.00 %	80 Paket	80 Paket	100.00 %
01	2016	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	N/A	N/A	15	Paket	15	Paket	100.00 %	15 Paket	15 Paket	100.00 %
01	2016	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	N/A	N/A	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %
01	2016	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22	Paket	N/A	N/A	22	Paket	22	Paket	100.00 %	22 Paket	22 Paket	100.00 %
01	2016	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	Laporan	N/A	N/A	40	Laporan	40	Laporan	100.00 %	40 Laporan	45 Laporan	112.50 %
01	2016	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	N/A	N/A	36	Laporan	36	Laporan	100.00 %	40 Laporan	45 Laporan	112.50 %
01	2018		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	N/A	N/A	100	(%)	100	(%)	100.00 %	100%	100%	100.00 %
01	2018	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2100	Laporan	N/A	N/A	2100	Laporan	2100	Laporan	100.00 %	2100 Laporan	2800 Laporan	133.33 %
01	2018	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	5	Laporan	N/A	N/A	5	Laporan	5	Laporan	100.00 %	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
01	207				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	N/A	N/A	4	Laporan	4	Laporan	100.00 %	100%	100%	100.00 %
01	207	01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	N/A	N/A	100	(%)	100	(%)	100.00 %	0 Unit	0 Unit	
01	207	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	N/A	N/A	1	unit	1	unit	100.00 %	1 unit	1 unit	100.00 %
01	207	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	unit	N/A	N/A	36	unit	36	unit	100.00 %	8 unit	8 unit	100.00 %
01	207	08			Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	unit	N/A	N/A	0	Unit	0	Unit	#DIV/0!	0 unit	0 unit	
01	209				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	N/A	N/A	24	Unit	24	Unit	100.00 %	100%	100%	100.00 %
01	209	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	unit	N/A	N/A	63	Unit	63	Unit	100.00 %	24 unit	24 unit	100.00 %
01	209	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63	unit	N/A	N/A	16	Unit	16	Unit	100.00 %	63 unit	63 unit	100.00 %
01	209	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	Unit	N/A	N/A	3	Unit	3	Unit	100.00 %	16 Unit	16 Unit	100.00 %
01	209	08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3	unit	N/A	N/A	12	Unit	12	Unit	100.00 %	3 unit	3 unit	100.00 %
01	209	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Unit	N/A	N/A	24	Unit	24	Unit	100.00 %	12 Unit	12 Unit	100.00 %

				Program Pengelolaan Keuangan Daerah			N/A	N/A									
					1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	100	%	N/A	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00 %	100%	100%	100.00 %
					2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	100	%	N/A	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00 %	100%	100%	100.00 %
					2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100	%	N/A	N/A	82.76	82.76	100.00	100.00	82.76%	100%	100%	100.00 %
02	201			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Penganggaran sesuai ketentuan	100	%	N/A	N/A	100.00	%	100.00	%	100.00 %	100%	100%	100.00 %
02	201	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	dokumen	N/A	N/A	2	dokumen	2	dokumen	100.00 %	2 dokumen	2 dokumen	100.00 %
02	201	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	dokumen	N/A	N/A	2	dokumen	2	dokumen	100.00 %	2 dokumen	2 dokumen	100.00 %
02	201	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28	dokumen	N/A	N/A	28	dokumen	28	dokumen	100.00 %	28 dokumen	28 dokumen	100.00 %
02	201	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28	dokumen	N/A	N/A	28	dokumen	28	dokumen	100.00 %	28 dokumen	28 dokumen	100.00 %
02	201	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	N/A	N/A	2	dokumen	2	dokumen	100.00 %	2 dokumen	2 dokumen	100.00 %
02	201	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	dokumen	N/A	N/A	3	dokumen	3	dokumen	100.00 %	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %
02	202			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	80%	%	N/A	N/A	100.00	%	100.00	%	100.00 %	80%	80%	100.00 %

0 2	20 1	0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28	dokumen	N/ A	N/ A	28	dokumen	28	dokumen	100.00 %	28 dokumen	28 dokumen	100.00 %
0 2	20 1	0 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28	dokumen	N/ A	N/ A	28	dokumen	28	dokumen	100.00 %	28 dokumen	28 dokumen	100.00 %
0 2	20 2	0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112	dokumen	N/ A	N/ A	112	dokumen	112	dokumen	100.00 %	112 dokumen	112 dokumen	100.00 %
0 2	20 2	0 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12	dokumen	N/ A	N/ A	12	dokumen	12	dokumen	100.00 %	12 dokumen	12 dokumen	100.00 %
0 2	20 2	0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16	dokumen	N/ A	N/ A	16	dokumen	16	dokumen	100.00 %	16 dokumen	16 dokumen	100.00 %
0 2	20 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2	Laporan	N/ A	N/ A	2	dokumen	2	dokumen	100.00 %	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %
0 2	20 2	0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	dokumen	N/ A	N/ A	12	dokumen	12	dokumen	100.00 %	12 dokumen	12 dokumen	100.00 %
0 2	20 2	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan	1	dokumen	N/ A	N/ A	1	dokumen	1	dokumen	100.00 %	1 dokumen	1 dokumen	100.00 %

			dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan												
02	203		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100	%	N/A	N/A	82.76	%	100.00	%	82.76%	100%	100%	100.00%
02	203	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	dokumen	N/A	N/A	103	dokumen	103	dokumen	100.00%	2 dokumen	2 dokumen	100.00%
02	203	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	laporan	N/A	N/A	12	laporan	12	laporan	100.00%	12 laporan	12 laporan	100.00%
02	203	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	dokumen	N/A	N/A	2	dokumen	2	dokumen	100.00%	2 dokumen	2 dokumen	100.00%
02	203	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	N/A	N/A	1	dokumen	1	dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
02	203	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	N/A	N/A	1	dokumen	1	dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
02	203	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	dokumen	N/A	N/A	1	dokumen	1	dokumen	100.00%	1 dokumen	1 dokumen	100.00%

02	203	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	103	Orang	N/A	N/A	103	orang	103	orang	100.00 %	103 Orang	103 Orang	100.00 %
02	204		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%	N/A	N/A	100.00 %	%	100.00 %	%	100.00 %	100%	100%	100.00 %
02	204	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	N/A	N/A	12	laporan	12	laporan	100.00 %	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %
03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	85,71	%	N/A	N/A	85.71	%	92.86	%	92.31%	85,71%	85.71%	100.00 %
03	201		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	68,34	%	N/A	N/A	68.11	%	68.82	%	98.96%	68,34%	68.34%	100.00 %
03	201	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	dokumen	N/A	N/A	2	dokumen	2	dokumen	100.00 %	2 dokumen	2 dokumen	100.00 %
03	201	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7	dokumen	N/A	N/A	7	dokumen	7	dokumen	100.00 %	7 dokumen	7 dokumen	100.00 %
03	201	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	laporan	N/A	N/A	1	laporan	1	laporan	100.00 %	1 laporan	1 laporan	100.00 %
03	201	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	laporan	N/A	N/A	1	laporan	1	laporan	100.00 %	1 laporan	1 laporan	100.00 %
03	201	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	laporan	N/A	N/A	1	laporan	1	laporan	100.00 %	1 laporan	1 laporan	100.00 %
03	201	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6	laporan	N/A	N/A	6	laporan	6	laporan	100.00 %	6 laporan	6 laporan	100.00 %
03	201	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	7	dokumen	N/A	N/A	7	dokumen	7	dokumen	100.00 %	7 dokumen	7 dokumen	100.00 %

				Penghapusan Barang Milik Daerah	Penghapusan Barang Milik Daerah												
03	201	11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	Laporan	N/A	N/A	1	dokumen	1	dokumen	100.00%	4 Laporan	4 Laporan	100.00%
03	201	12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14	laporan	N/A	N/A	14	laporan	14	laporan	100.00%	14 laporan	14 laporan	100.00%
03	201	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112	Orang	N/A	N/A	112	orang	112	orang	100.00%	112 Orang	112 Orang	100.00%
04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	104,19	%	N/A	N/A	100.00	%	100.00	%	100.00%	104,19%	102.09%	97.98%
04	201			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	%	N/A	N/A	100.00	%	126.82	%	78.85%	100%	113.41%	113.41%
04	201	01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	N/A	N/A	1	dokumen	1	dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
04	201	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	laporan	N/A	N/A	4	laporan	4	laporan	100.00%	4 laporan	4 laporan	100.00%
04	201	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17	Laporan	N/A	N/A	17	laporan	17	laporan	100.00%	17 Laporan	17 Laporan	100.00%
04	201	07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	800	Obyek Pajak	N/A	N/A	800	Objek Pajak	800	Objek Pajak	100.00%	800 Obyek Pajak	800 Obyek Pajak	100.00%
04	201	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000	Dokumen	N/A	N/A	36000	dokumen	36000	dokumen	100.00%	36000 Dokumen	36000 Dokumen	100.00%
04	201	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	N/A	N/A	12	dokumen	12	dokumen	100.00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%

04	201	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10	Dokumen	N/A	N/A	10	dokumen	10	dokumen	100.00 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00 %
04	201	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	dokumen	N/A	N/A	12	dokumen	12	dokumen	100.00 %	12 dokumen	12 dokumen	100.00 %
04	201	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	laporan	N/A	N/A	4	laporan	4	laporan	100.00 %	4 laporan	4 laporan	100.00 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang hingga Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Sasaran Strategi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023 (TW II)	%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	91,09	90,13	98,95
Meningkatnya	Rasio Kemandirian	34,61	41,16	118,93

Kemandirian Daerah	Keuangan Daerah			
Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	100	100
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	91,43	75,16	82,20
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	90,76	105,10	115,81
Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,25	30,12	119,29

Apabila dilihat dari tingkat kemajuan yang dicapai dari masing-masing indikator sampai dengan triwulan II tahun 2022 untuk indikator pencapaian sasaran strategis diperoleh 1 (satu) indikator dengan prosentase atau tingkat capaian sama dengan 100%, dan 3 (tiga) indikator yang tingkat kemajuannya lebih dari 100%. Maka bisa disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran BPKAD Kota Magelang telah baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Keuangan, disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang

No.	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023(Tw II)	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Renstra 2021-2026												
	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	-	-	89,28%	89,77%	91.09	92.03	113,55%	90,13	91.09	92.03	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			89,76%	89,76%	91.43	91.43	122,19%	75,16	91.43	91.43	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran			100%	100%	100.00	100.00	100%	45,00	100.00	100.00	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan			100%	100%	100.00	92.50	166,58%	80,47	100.00	92.50	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi			82,76%	100%	100.00	100.00	100%	100,00	100.00	100.00	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah			88,79%	89,77%	90.76	92.64	104,92%	105,10	90.76	92.64	

	Cakupan Pengelolaan BMD			85,71%	85,71%	85.71	85.71	100%	100	85.71	85.71	
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			32,02%	36,16%	34.61	35.64	54,03%	41,16	34.61	35.64	
	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah			23,82%	26,05%	25,25	25,81	38,26%	30,12	25,25	25,81	
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			100%	104,19%	110.00	115,47	176,51%	62,33	110.00	115,47	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai potensi PAD;
3. Pengelolaan keuangan yang baik, efisien, dan transparan perlu ditingkatkan.

2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Bedasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Tugas :

1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
7. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
8. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
10. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup tugasnya;
11. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
12. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
13. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang difokuskan pada pelayanan urusan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana berdasarkan ketentuan ini terdapat beberapa substansi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah khususnya terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 agar daerah memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang besarnya ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini berakibat pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu kecermatan dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja daerah.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026, ditetapkan visi

pembangunan Kota Magelang yaitu **“Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

MISI 1	Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
MISI 2	Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
MISI 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.
MISI 4	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
MISI 5	Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Keuangan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 Kota Magelang yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum terpenuhinya kualitas penganggaran sesuai dengan ketentuan;
- b. Belum efektifnya proses penatausahaan keuangan;

- c. Belum terpenuhinya tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel;
- d. Kurang optimalnya penerimaan PAD;
- e. Penyajian usulan RKBMD dari OPD kurang tepat waktu;
- f. Pemanfaatan dan pengamanan BMD yang belum optimal;
- g. Kompetensi SDM Pengelola Barang yang masih kurang.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
- b. Komitmen semua pegawai untuk mencapai visi dan misi Kota Magelang;
- c. Ketersediaan SDM yang lebih dapat dioptimalkan;
- d. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang bisa dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Magelang.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah pada tahun 2023;

- b. Menetapkan kerangka pendanaan yang bisa menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep money follow programme priority;
- c. Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Renja Perubahan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdiri dari 0 (nol) program dan 0 (nol) kegiatan, Urusan Pilihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdiri dari 03 program dan 06 kegiatan. Serta 01 program pendukung dan 07 Kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 4.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023
Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah: BPKAD Kota Magelang

lembar..... dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	6,914,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	6,914,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,854,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,854,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	2,688,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2,688,900	

			Perubahan RKA-SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,317,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3,317,000	
	Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,469,800	Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,469,800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 laporan	12,631,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 laporan	12,628,000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	8,010,406,239	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	8,881,827,807	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	13,291,900	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	13,291,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	49,781,838	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	61,934,928	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magelang	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1,999,800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magelang	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1,999,800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	35 Paket	5,986,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	35 Paket	5,986,400	

			bangunan kantor yang disediakan					kantor yang disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	80 Paket	15,463,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	80 Paket	15,463,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	9,567,700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	9,567,700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5,400,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	6,943,600	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	6,943,600	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	14,364,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	14,364,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	26 Laporan	111,616,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	111,616,000	

			Konsultasi SKPD								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	26,543,400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 laporan	71,607,479	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 laporan	53,590,460	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	315,849,084	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	315,849,084	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	90,085,095	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	54,042,098	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	242,093,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	242,093,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas	46 Unit	324,956,964	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	46 Unit	324,956,964	

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	92 unit	69,905,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	92 unit	69,905,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Magelang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	4 Unit	193,375,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Magelang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	3 unit	153,375,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	9 unit	657,393,226	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 unit	659,277,728	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	53,935,300	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	33,513,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	37,364,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	36,605,000	

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	40,494,400	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	40,494,400	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	15,381,600	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	8,173,100	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	9,601,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	9,601,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7,342,800	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	129,415,160	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	148,330,160	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	95,544,700	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	95,544,700	

			Perubahan APBD								
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	76,366,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	11,454,000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 Dokumen	8,199,400	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 dokumen	8,199,400	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	10,116,800	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	10,116,800	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	31,829,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 laporan	0	27,953,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Magelang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	20 Laporan	56,330,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Magelang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	20 Laporan	0	56,330,80
--	---	---------------	---	------------	------------	---	---------------	---	------------	---	-----------

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	105,688,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	100,595,000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Magelang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	18,082,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Magelang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	16,068,200	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	102 Dokumen	32,865,219	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	102 dokumen	26,859,546	

			Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					Pendapatan-LO, dan Beban			
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	28,479,719	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 laporan	4	35,051,26
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	91,890,900	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	0	91,890,90

	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	12,225,600	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	0	12,225,600	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	34,068,219	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	4	40,144,764	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	103 Orang	68,749,560	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	103 Orang		137,265,560	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	8,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan		15,591,464,200	

	Penyusunan Standar Harga	Kota Magelang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	20,481,900	Penyusunan Standar Harga	Kota Magelang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 dokumen	19,854,900	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	45,799,900	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	45,799,900	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	20,539,700	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 dokumen	20,539,700	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	195,053,376	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	254,638,356	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	56,495,500	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	56,495,500	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	352,257,700	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 dokumen	230,457,700	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	6 Laporan	245,791,700	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Laporan	245,791,700	

			Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah								
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	80,207,466	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	138,178,115	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Laporan	81,772,838	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 laporan	93,925,928	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 orang	35,609,800	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 orang	26,809,800	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1,446,571,155	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1,581,952,378	

	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	17,640,600	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	17,640,600	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	68,985,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	68,985,000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magelang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200 obyek pajak	24,180,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magelang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200 obyek pajak	24,180,000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36.000 Dokumen	65,967,200	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokumen	65,967,200	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan	12 Dokumen	7,878,900	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	7,878,900	

			Penelitian dan Verifikasi								
	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	309,565,700	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	221,765,700	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	116,355,400	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	55,355,400	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	92,489,900	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	111,179,900	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	36,256,800	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	36,256,800	
				TOTAL	22,482,834,211				TOTAL	30,921,435,140	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai unsur penunjang pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk perubahan tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut: (tidak ada)

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Perubahan Tahun 2023 Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Magelang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat

dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamm dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Pemerintahan masuk pada misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2022																												
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	1. A = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. B = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah $(A+B)/2 \times 100\%$	89.76%																												
2		Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang berkualitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Bobot</th> <th>Bulk Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>a. Proses dan Strategi (10%), meliputi: Perencanaan Kinerja (5%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) b. Penetapan Kinerja Tahunan (5%), meliputi: Perencanaan KKT (5%), Kualitas KKT (10%) dan Implementasi KKT (5%)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> <td>a. Pemecahan persoalan (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>a. Pemecahan persoalan (5%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Implementasi pelaporan (2,5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revisi Kinerja</td> <td>10%</td> <td>a. Pemecahan masalah (5%) b. Kualitas revisi (5%) c. Implementasi hasil revisi (5%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Kinerja yang diharapkan (10%) b. Kinerja yang diharapkan realisasi (10%) c. Kinerja tahun berjalan (berdasarkan) (5%)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Bobot	Bulk Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Proses dan Strategi (10%), meliputi: Perencanaan Kinerja (5%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) b. Penetapan Kinerja Tahunan (5%), meliputi: Perencanaan KKT (5%), Kualitas KKT (10%) dan Implementasi KKT (5%)	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemecahan persoalan (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemecahan persoalan (5%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Implementasi pelaporan (2,5%)	4	Revisi Kinerja	10%	a. Pemecahan masalah (5%) b. Kualitas revisi (5%) c. Implementasi hasil revisi (5%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang diharapkan (10%) b. Kinerja yang diharapkan realisasi (10%) c. Kinerja tahun berjalan (berdasarkan) (5%)	Total			100%	100%
No	Kategori	Bobot	Bulk Komponen																														
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Proses dan Strategi (10%), meliputi: Perencanaan Kinerja (5%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) b. Penetapan Kinerja Tahunan (5%), meliputi: Perencanaan KKT (5%), Kualitas KKT (10%) dan Implementasi KKT (5%)																														
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemecahan persoalan (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																														
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemecahan persoalan (5%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Implementasi pelaporan (2,5%)																														
4	Revisi Kinerja	10%	a. Pemecahan masalah (5%) b. Kualitas revisi (5%) c. Implementasi hasil revisi (5%)																														
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang diharapkan (10%) b. Kinerja yang diharapkan realisasi (10%) c. Kinerja tahun berjalan (berdasarkan) (5%)																														
Total			100%																														
3		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu	89.76%																												

				Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan Pelaporan Keuangan sesuai SAP DO = (A+B+C)/3 x 100%	
4		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	rasio jumlah pemanfaatan BMD terhadap potensi pemanfaatan BMD Rasio pensertifikatan tanah Persentase pengumpulan usulan RKBMD secara benar dan tepat waktu Persentase pengumpulan Laporan BMD yang benar dan tepat waktu DO : (A+B+C+D)/4 x 100%	89.77%
5	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Anggaran PAD Anggaran Transfer Pusat+Provinsi+P injaman (A/B) x 100%	36.16%
6		Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	PAD tahun(t) Pendapatan Daerah tahun(t) (A/B) x 100%	26.05%

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk perubahan tahun 2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada perubahan tahun 2023 pada awalnya disusun

sebanyak 07 program. Namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, dilakukan beberapa penyesuaian menjadi 04 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Magelang
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebe lum			Sesu dah	Tolok Ukur		T arget
						Se belum	Ses udah	Seb elum	Ses udah	Se belum	Ses udah							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	0 2				KEUANGAN								22,482,8 34,211	30,921,4 35,140			31,021, 392,683	
5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,197,9 63,299	11,059,9 00,969			11,755, 324,898	
5	0 2	0 1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								31,876,0 00	31,872,6 00			38,042, 867	

5	0 2	0 1	2. 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	6,914,900	6,914,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian , administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	7,261,065
---	--------	--------	--------------	--------	---	---	---	--	--	-------	-------	-----------	-----------	-------	-------	-----------	-----------	------------------------------	--	-------	-----------

5	0 2	0 1	2. 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 doku men	1 doku men	100 %	100 %	2,854,00 0	2,854,00 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	4,058,3 03
---	--------	--------	--------------	--------	--	---	--	--	---	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	---------------	---------------	------------------------------	---	----------	---------------

5	0 2	0 1	2. 0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 doku men	1 doku men	100 %	100 %	2,688,90 0	2,688,90 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	3,765,0 38
---	--------	--------	--------------	--------	--	---	--	--	--	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	---------------	---------------	------------------------------	---	----------	---------------

5	0 2	0 1	2. 0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	3,317,00 0	3,317,00 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan. , administrasi umum, penyediaan jasa penunjang	100 %	4,470,6 38
---	--------	--------	--------------	--------	------------------------------------	---	--	--	---	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	---------------	---------------	------------------------------	--	----------	---------------

5	0 2	0 1	2. 0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	3,469,800	3,469,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK)perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPDdan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	4,464,023
5	0 2	0 1	2. 0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	30 laporan	30 laporan	100 %	100 %	12,631,400	12,628,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian , administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang	100 %	14,023,800

		Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Kinerja SKPD														urusan Pemda sesuai ketentuan.		
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,073,47 9,977	8,957,05 4,635							9,223,4 23,493

5	0 2	0 1	2. 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia nya Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	48 Orang/B ulan	41 Orang/B ulan	100 %	100 %	8,010,40 6,239	8,881,82 7,807	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	9,142,5 95,910
5	0 2	0 1	2. 0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedia nya Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	24 dokumen	24 dokumen	100 %	100 %	13,291,9 00	13,291,9 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian , administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta	100 %	17,272, 868

5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,999,800	1,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	2,100,000
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											138,107,200	169,341,200				160,014,488

5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tersedianya laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 0	100 0	35 paket	35 paket	100 %	100 %	5,986,400	5,986,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian , administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 0	6,615,000
-----------------	--	--	--	--	--	-------	-------	----------	----------	-------	-------	-----------	-----------	------------------------------	---	-------	-----------

5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Tersedianya laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semarang, Kecamatan, Semarang Kelurahan	100 0	100 0	80 paket	80 paket	100 %	100 %	15,463,500	15,463,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 0	17,049,060
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	----------	----------	-------	-------	------------	------------	------------------------------	--	-------	------------

5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda,	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 0	100 0	15 paket	15 paket	100 %	100 %	9,567,70 0	9,567,70 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian , administrasi umum, penyediaan	100 0	11,445,000
		serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.													jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.		

5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 0	100 0	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	5,400,00 0	5,400,00 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 0	5,985,0 00
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tersedianya laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 0	100 0	25 paket	25 paket	100 %	100 %	6,943,60 0	6,943,60 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi	100 0	7,667,8 88

		kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.													keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semarang, Kecamatan, Semarang Kelurahan	100 0	100 0	14 laporan	14 laporan	100 %	100 %	14,364,000	14,364,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 0	23,787,540
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------	-------	------------	------------	-------	-------	------------	------------	------------------------------	--	-------	------------

5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100 0	100 0	26 laporan	31 laporan	100 %	100 %	80,382,000	111,616,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 0	85,890,000
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	26,543,400		0		
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit				0	26,543,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											477,541,658	423,481,642		508,598,045		

5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	3500 laporan	3500 laporan	100 %	100 %	71,607,479	53,590,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	83,898,045
-----------------	--------------------------------	--	---	---	--	-------	-------	--------------	--------------	-------	-------	------------	------------	------------------------------	--	-------	------------

5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	5 laporan	5 laporan	100 %	100 %	315,849,084	315,849,084	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian , administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	280,000,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	90,085,095	54,042,098	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi	100 %	144,700,000

		kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.													keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan n BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.		
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,474,958,664	1,449,607,692			1,823,146,005		

5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	24 unit	24 unit	100 %	100 %	242,093,000	242,093,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	233,306,640
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan	100 %	100 %	46 unit	46 unit	100 %	100 %	312,192,438	324,956,964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK)	100 %	422,227,000

	Perizinan Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan	penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya	penunja ng urusan pemerint ahan daerah	Semu a Kelura han													perencanaan penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaa n BMD OPDdan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.		
--	---	---	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terpenuhnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semarang, Kecamatan, Semula Kelurahan	100 %	100 %	92 unit	92 unit	100 %	100 %	69,905,000	69,905,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	77,512,365
-----------------	--	--	--	---	--	-------	-------	---------	---------	-------	-------	------------	------------	------------------------------	--	-------	------------

5 02 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 %	100 %	4 unit	3 unit	100 %	100 %	193,375,000	153,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	233,100,000
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------------	-------------	------------------------------	--	-------	-------------

5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semarang, Kecamatan, Semarang Kelurahan	100 %	100 %	9 unit	9 unit	100 %	100 %	657,393,226	659,277,728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	857,000,000
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											8,964,970,377	16,537,880,694		16,003,908,897		
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											465,444,960	383,715,660		428,002,243		

5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Meningkatnya penganggaran sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	53,935,300	33,513,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	60,568,043
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Meningkatnya penganggaran sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	37,364,000	36,605,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	31,467,000

5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Meningkatnya penganggaran sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	40,494,400	40,494,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	44,544,000
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Meningkatnya penganggaran sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	15,381,600	8,173,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	35,577,000

5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Meningkatnya penganggaran sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan . Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	9,601,000	9,601,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	10,081,050
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Meningkatnya penganggaran sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan . Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	7,342,800	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	7,710,150

5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Meningkatnya penganggaran sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	129,415,160	148,330,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	142,356,000
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Meningkatnya penganggaran sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	95,544,700	95,544,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	95,699,000

5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan	Meningkatnya penganggaran sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	76,366,000	11,454,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan	100 % 100 % 100 %	0
		Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Bidang Anggaran		Semua Kelurahan										Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi		
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												231,246,200	219,263,200		248,502,450	

5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	112 Dokumen	112 Dokumen	100 %	100 %	8,199,400	8,199,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100 % 100 % 100 %	9,645,300
5 02 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	11,117,000	10,116,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang	100 % 100 % 100 %	11,672,850

		2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi													anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi		
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	16 Dokumen	16 Dokumen	100 %	100 %	31,829,000	27,953,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100 % 100 % 100 %	33,420,450

5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Magelang, Semu a Kecamatan . Semu a Kelurahan	Meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100 % 100 %	100 % 100 %	20 Lapo ran	20 Lapo ran	100 %	100 %	56.330,8 00	56.330,8 00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % %	59,070, 900
-----------------	---	--	---	--	--	----------------	----------------	-------------	-------------	-------	-------	-------------	-------------	-------------------------------	--	---------------------	-------------

5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan . Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	105,688,000	100,595,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100 % 100 % 100 %	112,287,000
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan . Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	18,082,000	16,068,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan	100 % 100 % 100 %	22,405,950

		3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	aban Sub Kegiatan													keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi		
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											268,279,217	343,437,634		327,404,204			
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Meningkatnya LK OPD sesuai dengan ketentuan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	102 Dokumen	102 Dokumen	100 %	100 %	32,865,219	26,859,546	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100 % 100 % %	42,526,733	

5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Meningkatnya LK OPD sesuai dengan ketentuan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	28,479,719	35,051,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	36,723,173
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya LK OPD sesuai dengan ketentuan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	91.890,900	91.890,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100 % 100 % 100 %	112,924,665

	Kabupaten/Kota																	
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya LK OPD sesuai dengan ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan . Semu a Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	12,225,600	12,225,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100 % 100 % %	18,515,633	

5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya LK OPD sesuai dengan ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	34,068,219	40,144,764	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100 % 100 % 100 %	42,872,000
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya LK OPD sesuai dengan ketentuan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	103 Orang	103 Orang	100 %	100 %	68,749,560	137,265,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran 2. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan 3. Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100 % 100 % 100 %	73,842,000

5 02 02 2.04 Penu	njang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										8,000,00 0,000	15,591,4 64,200		15,000, 000,00 0			
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesa k	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolan Dana Darurat dan Mendesa k	Meningkatnya Pengelolan Dana Darurat dan Mendesa k yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kota Magelang, Semu a Kecamatan . Semu a Kelurahan	100 %100 %100 %	100 %100 %100 %	12 Lapo ran	12 Lapo ran	100 %	100 %	8,000,00 0,000	15,591,4 64,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100 %100 %100 %	15,000, 000,000
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										1,134,00 9,880	1,132,49 1,599		1,254,8 17,600			
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										1,134,00 9,880	1,132,49 1,599		1,254,8 17,600			
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanaan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan . Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	3 Dok ume n	2 Dok ume n	100 %	100 %	20,481,9 00	19,854,9 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	21,151, 900

5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanaan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	45,799,900	45,799,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	49,523,100
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanaan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	20,539,700	20,539,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	22,594,000
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanaan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	1 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	195,053,376	254,638,356	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	192,109,500
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanaan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	56,495,500	56,495,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	62,156,600

5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	352,257,700	230,457,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	418,709,500
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Semu a Kab/Kota, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	245,791,700	245,791,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	267,257,100
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	80,207,466	138,178,115	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	87,371,400
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	14 Laporan	14 Laporan	100 %	100 %	81,772,838	93,925,928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	94,773,500

				nan BMD														
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan BMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanaan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	85.71 %	85.71 %	200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	35,609,800	26,809,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pengelolaan BMD	85.71 %	39,171,000
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											2,185,890,655	2,191,161,878		2,007,341,288			
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											2,185,890,655	2,191,161,878		2,007,341,288			
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	110.06 %	110.06 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,446,571,155	1,581,952,378	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06 %	1,292,077,080
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	110.06 %	110.06 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	17,640,600	17,640,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06 %	24,347,610

5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.06%	110.06%	17 Laporan	17 Laporan	100%	100%	68,985,000	68,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06%	90,804,105
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.06%	110.06%	1200 Objek Pajak	1200 Objek Pajak	100%	100%	24,180,000	24,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06%	35,233,695
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.06%	110.06%	36000 Dokumen	36000 Dokumen	100%	100%	65,967,200	65,967,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06%	85,067,993
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.06%	110.06%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	7,878,900	7,878,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06%	10,912,545

5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	110.06 %	110.06 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	309,565,700	221,765,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06 %	383,707,485
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	110.06 %	110.06 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	116,355,400	55,355,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06 %	20,627,775
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	110.06 %	110.06 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	92,489,900	111,179,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06 %	21,425,000
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kota Magelang, Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan	110.06 %	110.06 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	36,256,800	36,256,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	110.06 %	43,138,000
TOTAL												22,482,834,211	30,921,435,140				31,021,392,683

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKPD) maka disusunlah Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2023. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perubahan Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan tahun 2023 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Perubahan Renja 2023 (Tahun n)	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4		5		6		7		8	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	0	2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	24,175%	2,764,975,242	24,175%	2,764,975,242	24,175%	2,764,975,242	24,175%	2,764,975,242	96,7%	11,059,900,969
5	0	0	2 · 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	25%	7,968,150	25%	7,968,150	25%	7,968,150	25%	7,968,150	100%	31,872,600

5	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun jumlah dokumen renstra yang di review	1 dokumen	1,728,725	1 dokumen	1,728,725	1 dokumen	1,728,725	3 Dokumen	6,914,900
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	713,500	-	713,500	-	713,500	1 dokumen	2,854,000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	672,225	-	672,225	-	672,225	1 dokumen	2,688,900
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	829,250	-	829,250	-	829,250	1 dokumen	3,317,000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen	867,450	-	867,450	-	867,450	1 dokumen	3,469,800
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	7 laporan	3,157,000	7 laporan	3,157,000	7 laporan	9 laporan	30 laporan	12,628,000
0	0	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	25%	2,239,263,659	25%	2,239,263,659	25%	2,239,263,659	3 Dokumen	8,957,054,635
5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan (dalam 1 tahun)	41 Orang/Bulan	2,220,456,952	41 Orang/Bulan	2,220,456,952	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	8,881,827,807
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	6 Dokumen	3,322,975	6 Dokumen	3,322,975	6 Dokumen	6 Dokumen	24 Dokumen	13,291,900

5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun	5 Laporan	15,483,732	5 Laporan	15,483,732	4 Laporan	4 Laporan	15,483,732	18 Laporan	61,934,928	
5	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	25%	499,950	25%	499,950	25%	499,950	25%	499,950	100%	1,999,800
5	0	0	2	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	499,950	3 Dokumen	499,950	3 Dokumen	3 Dokumen	499,950	3 Dokumen	12 Dokumen	1,999,800
5	0	0	2	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	25%	42,335,300	25%	42,335,300	25%	42,335,300	25%	42,335,300	100%	169,341,200
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya	8 Paket	1,496,600	8 Paket	1,496,600	8 Paket	9 Paket	1,496,600	9 Paket	35 Paket	5,986,400
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	20 Paket	3,865,875	20 Paket	3,865,875	20 Paket	20 Paket	3,865,875	20 Paket	80 Paket	15,463,500
5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang yang dicetak	3 Paket	2,391,925	3 Paket	2,391,925	3 Paket	4 Paket	2,391,925	4 Paket	15 Paket	9,567,700
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1 Dokumen	1,350,000	1 Dokumen	1,350,000	31 Dokumen	-	1,350,000	-	3 Dokumen	5,400,000
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan	6 Paket	1,735,900	6 Paket	1,735,900	6 Paket	7 Paket	1,735,900	7 Paket	25 Paket	6,943,600

5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	3 Laporan	3,591,000	3 Laporan	3,591,000	3 Laporan	3,591,000	5Laporan	3,591,000	14 Laporan	14,364,000
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	7 Laporan	27,904,000	7 Laporan	27,904,000	8 Laporan	27,904,000	9 Laporan	27,904,000	31 Laporan	111,616,000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	25%	105,870,411	25%	105,870,411	25%	105,870,411	25%	105,870,411	100%	423,481,642
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	875 laporan	13,397,615	875 laporan	13,397,615	875 laporan	13,397,615	875 laporan	13,397,615	3500 laporan	53,590,460
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	78,962,271	1 Laporan	78,962,271	1 Laporan	78,962,271	2Laporan	78,962,271	5 Laporan	315,849,084
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 laporan	13,510,525	3 laporan	13,510,525	3 laporan	13,510,525	3 laporan	13,510,525	12 laporan	54,042,098
5	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%	26,543,400	100%	26,543,400
5	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							2 unit	26,543,400	2 unit	26,543,400
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang	20%	362,401,923	20%	362,401,923	20%	362,401,923	20%	362,401,923	80%	1,449,607,692

5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	DO : Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran, pelayanan penatausahaan keuangan, dan laporan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan	21,3325 %	4,134,470,174	21,3325 %	4,134,470,174	21,3325 %	4,134,470,174	21,3325 %	4,134,470,174	85,33%	16,537,880,694
5	0	0	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Penganggaran sesuai ketentuan	31 dokumen	95,928,915	30 dokumen	95,928,915	30 dokumen	95,928,915	30 dokumen	95,928,915	121 dokumen	383,715,660
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS 2023	1 Dokumen	8,378,325	1 Dokumen	8,378,325	-	8,378,325	-	8,378,325	2 dokumen	33,513,300
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perub KUA dan Perub PPAS 2022	1 Dokumen	9,151,250	1 Dokumen	9,151,250	-	9,151,250	-	9,151,250	2 dokumen	36,605,000
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023	7 Dokumen	10,123,600	7 Dokumen	10,123,600	7 Dokumen	10,123,600	7 Dokumen	10,123,600	28 Dokumen	40,494,400
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKPA SKPD	7 Dokumen	2,043,275	7 Dokumen	2,043,275	7 Dokumen	2,043,275	7 Dokumen	2,043,275	28 Dokumen	8,173,100
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	jumlah DPA SKPD Tahun 2023	7 Dokumen	2,400,250	7 Dokumen	2,400,250	7 Dokumen	2,400,250	7 Dokumen	2,400,250	28 Dokumen	9,601,000
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah DPPA SKPD tahun 2022	7 Dokumen	0	7 Dokumen	0	7 Dokumen	0	7 Dokumen	0	28 dokumen	0

5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2023	1 Dokumen	37,082,540	1 Dokumen	37,082,540	-	-	37,082,540	2 dokumen	148,330,160	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022	1 Dokumen	23,886,175	1 Dokumen	23,886,175	-	-	23,886,175	2 dokumen	95,544,700	
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	11,454,000							11,454,000	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	20%	54,815,800	20%	54,815,800	20%	54,815,800	20%	54,815,800	80%	219,263,200
5	0	0	2	0	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	28 Dokumen	2,049,850	28 Dokumen	2,049,850	28 Dokumen	28 Dokumen	2,049,850	112 dokumen	8,199,400	
5	0	0	2	0	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	3 Dokumen	2,529,200	3 Dokumen	2,529,200	3 Dokumen	3 Dokumen	2,529,200	12 Dokumen	10,116,800	
5	0	0	2	0	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	4 laporan	6,988,250	4 laporan	6,988,250	4 laporan	4 laporan	6,988,250	16 laporan	27,953,000	

5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Berita Acara Rekonsiliasi Data Pajak	5 Laporan	14,082,700	5 Laporan	14,082,700	5 Laporan	5 Laporan	14,082,700	5 Laporan	14,082,700	20 Laporan	56,330,800
5	0	0	2	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Laporan Aliran Kas	4 Dokumen	25,148,750	4 Dokumen	25,148,750	4 Dokumen	4 Dokumen	25,148,750	4 Dokumen	25,148,750	12 Dokumen	100,595,000
5	0	0	2	1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	4,017,050	-	4,017,050	-	-	4,017,050	-	4,017,050	1 dokumen	16,068,200
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	21,5%	85,859,409	21,5%	85,859,409	21,5%	21,5%	85,859,409	21,5%	85,859,409	86%	343,437,634
5	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	26 Dokumen	6,714,887	26 Dokumen	6,714,887	26 Dokumen	25 Dokumen	6,714,887	25 Dokumen	6,714,887	102 dokumen	26,859,546

5	0	0	2	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan konsolidasi bulanan	3 Laporan	8,762,816	3 Laporan	8,762,816	3 Laporan	8,762,816	3 Laporan	8,762,816	12 laporan	35,051,264
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	22,972,725	1 Dokumen	22,972,725	-	22,972,725	-	22,972,725	2 dokumen	91,890,900
5	0	0	2	0	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan prognosis	1 Dokumen	3,056,400	1 Dokumen	3,056,400	-	3,056,400	-	3,056,400	2 Dokumen	12,225,600
5	0	0	2	0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperwal tentang Bagan Akun Standar	1 Dokumen	10,036,191	-	10,036,191	-	10,036,191	-	10,036,191	1 dokumen	40,144,764
5	0	0	2	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Raperwal tentang Kebijakan Akuntansi	26 Orang	34,316,390	26 Orang	34,316,390	26 Orang	34,316,390	26 Orang	34,316,390	103 Orang	137,265,560
5	0	0	2	0	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	25%	3,897,866,050	25%	3,897,866,050	25%	3,897,866,050	25%	3,897,866,050	100%	15,591,464,200

5	0	0	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Laporan	3,897,866,050	3 Laporan	3,897,866,050	3 Laporan	3,897,866,050	3 Laporan	3,897,866,050	12 Laporan	15,591,464,200
5	0	0	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan BMD	20,75%	283,122,900	20,75%	283,122,900	20,75%	283,122,900	20,75%	283,122,900	83%	1,132,491,599
5	0	0	2	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	20,75%	283,122,900	20,75%	283,122,900	20,75%	283,122,900	20,75%	283,122,900	83%	1,132,491,599
5	0	0	2	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya	1 Dokumen	4,963,725	1 Dokumen	4,963,725	1 Dokumen	4,963,725	-	4,963,725	3 dokumen	19,854,900
5	0	0	2	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		11,449,975		11,449,975		11,449,975	1 Dokumen	11,449,975	1 Dokumen	45,799,900
5	0	0	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan Pentausahaan BMD	2 Dokumen	5,134,925	2 Dokumen	5,134,925	2 Dokumen	5,134,925	1 Dokumen	5,134,925	7 dokumen	20,539,700
5	0	0	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD	1 Laporan	63,659,589	1 Laporan	63,659,589	-	63,659,589	-	63,659,589	2 Laporan	254,638,356
5	0	0	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja	1 laporan	14,123,875	-	14,123,875	-	14,123,875	-	14,123,875	1 laporan	56,495,500

5	0	0	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil penilaian Barang Milik Daerah	3 dokumen	57,614,425	3 dokumen	57,614,425	3 dokumen	57,614,425	3 dokumen	57,614,425	12 dokumen	230,457,700
5	0	0	2	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan kegiatan usulan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan BMD	2 Laporan	61,447,925	2 Laporan	61,447,925	2 Laporan	61,447,925		61,447,925	6 Laporan	245,791,700
5	0	0	2	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	34,544,529	2 Dokumen	34,544,529	2 Dokumen	34,544,529	1 Dokumen	34,544,529	7 Dokumen	138,178,115
5	0	0	2	1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	23,481,482	4 Laporan	23,481,482	3 Laporan	23,481,482	3 Laporan	23,481,482	14 laporan	93,925,928
5	0	0	2	1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya	50 orang	6,702,450	50 orang	6,702,450	50 orang	6,702,450	50 orang	6,702,450	200 orang	26,809,800
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6%	547,790,470	6%	547,790,470	6%	547,790,470	6%	547,790,470	24%	2,191,161,878
5	0	0	2	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	25%	547,790,470	25%	547,790,470	25%	547,790,470	25%	547,790,470	100%	2,191,161,878
5	0	0	2	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	1 Dokumen	395,488,095	-	395,488,095	-	395,488,095	-	395,488,095	1 Dokumen	1,581,952,378

5	0	0	2	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	4,410,150	1 Laporan	4,410,150	1 Laporan	4,410,150	1 Laporan	4,410,150	4 Laporan	17,640,600
5	0	0	2	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peta Digitalisasi PBB yang terupdate	5 Laporan	17,246,250	4 Laporan	17,246,250	4 Laporan	17,246,250	4 Laporan	17,246,250	17 Laporan	68,985,000
5	0	0	2	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Dokumen BPHTB yang tervalidasi Laporan Penilaian PBBP2	300 obyek pajak	6,045,000	300 obyek pajak	6,045,000	300 obyek pajak	6,045,000	300 obyek pajak	6,045,000	1200 obyek pajak	24,180,000
5	0	0	2	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Berkas SPPT PBB P2	9000 Dokumen	16,491,800	9000 Dokumen	16,491,800	9000 Dokumen	16,491,800	9000 Dokumen	16,491,800	36000 Dokumen	65,967,200
5	0	0	2	1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Jenis Pajak	3 Dokumen	1,969,725	3 Dokumen	1,969,725	3 Dokumen	1,969,725	3 Dokumen	1,969,725	12 Dokumen	7,878,900
5	0	0	2	1	Penagihan Pajak Daerah	Jenis laporan	3 Dokumen	55,441,425	3 Dokumen	55,441,425	3 Dokumen	55,441,425	1 Dokumen	55,441,425	10 Dokumen	221,765,700
5	0	0	2	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan tunggakan wajib pajak	3 Dokumen	13,838,850	3 Dokumen	13,838,850	3 Dokumen	13,838,850	3 Dokumen	13,838,850	12 Dokumen	55,355,400
5	0	0	2	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi	1 Laporan	27,794,975	1 Laporan	27,794,975	1 Laporan	27,794,975	1 Laporan	27,794,975	4 Laporan	111,179,900

					Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	9,064,200		9,064,200		9,064,200		9,064,200	1 Laporan	36,256,800

BAB V PENUTUP

Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Magelang tahun 2023.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Perubahan Tahun 2023 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Magelang.

Magelang, Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KOTA MAGELANG



SUSILOWATI, SE, MT, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19721101 199803 2 008



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan maupun pengurangan program, kegiatan subkegiatan, serta pagu setiap urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2023.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2023 disusun dengan sistematika:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA MAGELANG,

ttd

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 20



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 050.24/178/12 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah yang integratif, terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan daerah guna pencapaian kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - b. bahwa rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Agustus 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 050.24/178/112 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DAFTAR PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	182.965.938.135
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	428.169.140.508
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	63.634.239.564
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	56.946.974.161
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	15.369.280.093
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	4.831.226.458
7	Dinas Sosial Kota Magelang	11.900.829.746
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	15.822.790.507
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	31.111.789.583
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	5.773.023.741
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	14.343.860.186
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	18.157.853.286
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	12.958.810.101
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	5.926.527.141
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	14.687.241.168
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	5.906.612.622
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	10.328.311.659
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	21.468.322.019
19	Sekretariat Daerah Kota Magelang	43.796.989.768
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	39.930.320.486

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	9.323.208.118
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	30.921.435.140
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	10.258.032.071
24	Inspektorat Daerah Kota Magelang	7.415.583.142
25	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	20.680.974.208
26	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	22.557.072.120
27	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	19.294.228.185
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	11.037.214.120
	TOTAL	1.135.517.828.036

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ





WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 050.29/149/112 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan dan mengumpulkan materi kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - b. melaksanakan seluruh pengadministrasian pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - c. melaksanakan analisis dan menyusun dokumen penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Mei 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 050-21/195/112 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
 DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Ketua
3.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Wakil Ketua
4.	1 (satu) orang Analis Perencanaan Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

